



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
(PSAK) NO. 105 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) BINA UMAT SEJAHTERA
INDRAMAYU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

PATKIYAH
14112210118



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATICIREBON**

2015 M /1436 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
(PSAK) NO. 105 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) BINA UMAT SEJAHTERA
INDRAMAYU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

PATKIYAH
14112210118

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATICIREBON
2015 M /1436 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Patkiyah NIM: 14112210118 “Analisis Penerapan PSAK No. 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera Indramayu”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan keuangan mikro syari'ah khususnya lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam perekonomian, dimana pengusaha mikro masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu dan Apakah penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera telah sesuai dengan PSAK 105. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 105 tentang pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera Indramayu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data penelitian ini diperoleh adalah data primer yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan. Adapun, data sekunder diperoleh dengan cara telaah pustaka dan literatur ilmiah lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Prosedur-prosedur dalam sistem pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BMT Bina Umat Sejahtera dapat diklasifikasikan atas empat prosedur yaitu prosedur aplikasi pembiayaan mudharabah, prosedur realisasi pembiayaan mudharabah, prosedur monitoring pembiayaan mudharabah, dan prosedur penutupan fasilitas pembiayaan mudharabah dan Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu telah sesuai dengan PSAK 105, Kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian.

Kata kunci: *Sistem Pembiayaan, Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

Patkiyah NIM: 14112210118 “Analysis Implementation PSAK No. 105 to Mudharabah Financing at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera Indramayu”.

The research was motivated by the development of Islamic financial institutions in particular institution micro Baitul Mat Wat Tamwil (BMT), which has an important role in the economy, which is still difficult to develop micro entrepreneurs. This is because the micro entrepreneurs who are generally from the lower walks of life virtually untouched and is cosidered to have the potential funding by formal financial institutions convensional financial institutions.

Research formulation that rise up in this research are how financing system mudharabah to BaitulMaalWatTamwil (BMT) BinaUmat Sejahtera Indramayu and what the implementation of mudharabah financing in BaitulMaalWatTamwil is conform to PSAK No. 105. This research aims to analyze the implementation PSAK No.105 on Mudharabah financing in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera Indramayu. This research is a qualitative research with descriptive comparative approach. Data used in this research is primary data were taken by obsevation and direct interview with financing department. Whereas secondary data were taken by literary review, and ather scientific literatures.

The result show that the system of mudharabah is framework from procedurs which have connection have been arranged with schema of coast comprehensive, the procedurs of system coast in mudharabah which is reply in Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera can be classification on four procedurs, there are procedur apply of coast mudharabah, procedur realize of coast mudharabah, procedur monitoring of coast mudharabah, and procedur closing facilities of coast mudharabah. and the treatment accounting of mudharabah which is replied by Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera branch of Indramayu have been appropriate with PSAK 105, the appropriinte can wee see in the characteristic, admissioan and measuring, act of expressing, except in presentation.

Keywords: *Financing System, Mudharabah Financing, PSAK 105.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Psak No.105 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu), oleh Patkiyah, Nomor Induk Mahasiswa :14112210118, telah diujikan dalam sidang munaqasah IAIN SYEKH NURJATI CIREBON pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam (SE,I)** di Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 03 Juni 2015

Sidang Munaqasah

Ketua

Merangkap Anggota

H. Juju Jumena, SH., MH
NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris

Merangkap Anggota

Eef Saefullah, S.Ag., MHI
NIP. 19760312200312 1 003

Anggota

Penguji I,

Ibi Syatibi, M.Si
NIP. 19770910 200901 1 001

Penguji II,

H. Djohar Arifin, SE, S.Ag, MA
NIP. 19570303 1981031 1 008



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN OTENTISITAS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
GAMBAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Tempat dan Waktu Penelitian	12



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Metode dan Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data.....	14
4. Menentukan Unit Analisis	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah	17
1. Awal Adanya PSAK 105	17
2. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Mudharabah	18
B. Lembaga Keuangan Syariah.....	19
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	19
2. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah.....	20
3. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Non Bank Syariah	22
C. BMT	25
1. Pengertian BMT	25
2. Prinsip BMT	26
3. Kegiatan Operasional BMT	27
D. Pembiayaan dan Sistem Pembiayaan	32
1. Pengertian Pembiayaan	32
2. Pengertian Sistem dan Sistem Pembiayaan	33
3. Jenis-jenis Pembiayaan.....	34
E. Pembiayaan Mudharabah	37
1. Pengertian Mudharabah	37
2. Landasan Syariah Mudharabah	39
3. Jenis Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah	41
4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah	43
5. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....	45
F. Akuntansi Pembiayaan Mudharabah	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Karakteristik	46
2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah.....	48
3. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah	49

BAB III KONDISI OBJEKTIF BMT BINA UMAT SEJAHTERA

A. Sejarah singkat BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu	50
B. Visi dan Misi BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu	51
C. Fungsi dan Tujuan BMT	51
D. Usaha BMT	52
E. Landasan Hukum	52
F. Sistem Operasional	54
G. Struktur Organisasi	57
H. Kegiatan Operasional BMT	58
I. Produk-produk BMT	58
J. Jenis Simpanan BMT	63
K. Persyaratan yang ada dalam Ijab dan Qabul Pembiayaan Mudharabah....	63
L. Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	64
M. Data Perkembangan Mudharabah	65

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Umat Sejahtera	68
B. Sistem Pembiayaan Mudharabah	69
C. Analisis Kesesuaian Akuntansi Mudharabah pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu dengan PSAK 105	74
1. Karakteristik.....	74
2. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah	79
3. Penyajian.....	82
4. Pengungkapan	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
---------------------	----



B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pemikiran.....	12
Gambar Struktur Organisasi BMT BUS Indramayu	57
Gambar Grafik Nasabah Pembiayaan Mudharabah	66
Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah di BMT BUS	69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nasabah Pembiayaan Mudharabah	66
Tabel4.1 Kesesuaian antara PSAK No.105 Paragraf 4 dengan BMT	74
Tabel4.2 Kesesuaian antara PSAK No. 105 Paragraf 8 dengan BMT	76
Tabel4.3 Kesesuaian antara PSAK No. 105 Paragraf 9 dengan BMT	78
Tabel 4.4 Kesesuaian antara PSAK No. 105 Paragraf 10 dengan BMT	79
Tabel 4.5 Pengukuran Investasi Mudharabah	80
Tabel 4.6 Penyajian Akuntansi Mudharabah	82
Tabel 4.7 Pengungkapan Akuntansi Mudharabah	84



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tanggapan dari Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Bina Umat Sejahtera
2. LembarPermohonanPembukaanSimpanan di BMT BUS
3. LembarPermohonanAnggotaBaru di BMT BUS
4. LembarPermohonanPembiayaan di BMT BUS
5. LembarAkadPembiayaanMudharabah (KerjasamaBagiHasil)
6. PerhitunganHasil Usaha di BMT BUS
7. JadwalPelaksanaan Proposal danSkripsi
8. SuratKeteranganTelahMelakukanPenelitian di BaitulMaalWatTamwil (BMT) BinaUmat Sejahtera CabangIndramayu
9. SuratPermohonanPraObservasi
10. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
11. Surat Pengantar Penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut Kamus Besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya). Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ص	Syīn	Sy	-
ض	ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ظ	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanâ
قَرَّبَ	Ditulis	Qarraba
الْحَدُّ	Ditulis	al-ḥaddu

C. Tā' Marbūṭah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya. Contoh:

طَلْحَة	Ditulis	ṭalhah
التَّوْبَة	Ditulis	al-taubah
فَاطِمَة	Ditulis	Fātimah



2. Pada kata yang terakhir dengan *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍatul aṭfāl
-----------------------	---------	----------------

Huruf *ta marbuthah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan *waqaf/ berhenti*). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

D. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	A	كَسْرَ	Ditulis	Kasara
Kasrah	Ditulis	I	يَضْرِبُ	Ditulis	yaḍribu
Dammah	Ditulis	U	سُئِلَ	Ditulis	su'ila

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û). Contoh:

قَالَ	Ditulis	Qâla
قِيلَ	Ditulis	Qîla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqûlu

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي). Contoh:

كَيْفَ	Ditulis	Kaifa
--------	---------	-------

2. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au* (او). Contoh:

هَوَّلَ	Ditulis	Haula
---------	---------	-------



G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan. Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ditulis	ta'khuzûna
تُؤْمِرْنَ	Ditulis	tu'maruna
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

الرَّحِيمِ	Ditulis	ar-Rahîmu
الرجال	Ditulis	ar-rijâl
الشَّمْسُ	Ditulis	as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*. Contoh:

الْمَلِكُ	Ditulis	al-Maliku
الكَافِرُونَ	Ditulis	al-kâfirûn
الْقَلَمُ	Ditulis	al-qalamu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat mendukung segala bentuk dari tata kelola yang positif. Nilai-nilai dan etika yang ada telah terlebih dahulu terbangun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam komunitas Islam. *Corporate governance* secara Islam menjangkau hingga prinsip dasar dari ekonomi yang baik yaitu ummah, persaudaraan, keadilan, akuntabilitas, dan distribusi pendapatan yang merata. Selanjutnya, ketika kebaikan dari Islam akan selalu mendukung *good corporate governance*, tantangan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Hal yang berhubungan erat dengan masalah tata kelola adalah peranan dari disiplin pasar (*market discipline*). Transparansi dan pengungkapan (*disclosure*) menjadi sangat penting dalam perubahan lingkungan yang cepat dewasa ini. Ketika informasi keuangan yang komprehensif dan selalu tersedia dapat meningkatkan disiplin pasar, pengungkapan informasi dibutuhkan untuk melengkapi kemampuan dari pemain pasar dalam menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Transparansi dan pengungkapan bahkan lebih selaras dalam peran ganda yang dimainkan oleh institusi keuangan Islam dalam menghadapi konsumen perbankan syariah. Hal ini menjadi relevan karena transaksi keuangan berbasis syariah tidak hanya membahas hubungan antara peminjam dan yang dipinjamkan semata seperti halnya di perbankan konvensional.¹

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.

¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 166-167.



Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia.

Disamping ICMI, beberapa organisasi masa Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka banyak memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat². Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang, tidak hanya diperbankan tetapi juga lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan perbankan syari'ah, sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga keuangan mikro syari'ah, yang salah satunya yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).³

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Segmen masyarakat yang

²PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* Jakarta: PINBUK, t.th), 11

³Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 60.



biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang membutuhkan dana. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Akan tetapi dalam menerapkan ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada kuantitas pelakunya dan juga diuntut pemahaman yang benar dalam berekonomi sehingga tidak terkesan hanya menggunakan label, sehingga aktivitas muamalah yang dijalankan benar-benar sesuai syariah⁴. Untuk itu perlu sosialisasi pemahaman ekonomi Islam yang benar bagi semua elemen masyarakat.

Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan syariah, BMT mengambil peran positif untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sehingga BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga sistem ketahanan ekonomi Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah.⁵

Beberapa kelemahan dan penyakit yang kini dirasakan oleh BMT, umumnya berkisar pada lemahnya sumber daya manusia, manajemen, fasilitas, servis, permodalan, dan lain sebagainya. Kelemahan-kelemahan BMT tersebut pada gilirannya berujung pada sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas (*public trust*) terhadap jasa dan pelayanan yang bisa diberikan BMT.⁶

Perkembangan industri keuangan syari'ah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dimaksud berarti secara yuridis empiris telah diakui keberadaannya oleh warga negara masyarakat Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (*mudharabah*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang

⁴Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 113.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekt Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 31.

⁶Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, 82.



kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.⁷

Adapun dalam rangka penyaluran dana mudharabah, BMT bertindak sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal tertentu yang dianggap feasible. Karena landasan mudharabah murni kepercayaan dari shahibul al-mal, BMT dituntut ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah. lebih dari yang sewajarnya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi BMT mengingat mudharabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung dan rugi. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, resiko financial sepenuhnya menjadi tanggung jawab BMT, selain bila dapat dibuktikan kerugian itu akibat kecerobohan dan kecurangan nasabah.⁸ Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam.⁹

Pada penerapan prinsip syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan mudharabah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK 59 yang telah menjadi standar baku bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Revisi PSAK 59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad syariah dan PAPS 2003 sebagai standar pengukurannya.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 12.

⁸ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 65.

⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 204.



Dalam perkembangan dan pertumbuhan perbankan selanjutnya, salah satu pelayanan keuangan syari'ah dalam bentuk lembaga keuangan mikro adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* terdiri dari 2 (dua) istilah, yaitu *Baitul Maal dan Wat Tamwil*.¹⁰ *Baitul maal* merupakan bidang sosial dalam pelanggan dana zakat, infaq, sedekah dan dana-dana sosial lain yang kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial secara terpolo dan berkesinambungan, sedangkan *baitul tanwil* merupakan suatu usaha pengumpulan dan penyaluran dana konvensional dengan landasan syar'iah.

Berdirinya Bank Islam (Perbankan Syari'ah) diawali dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-unnah.¹¹

PSAK No.105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tentang**

¹⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2005), 96.

¹¹ Dianita Kristansi, dkk, *Prinsip Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: MSI-UII Net, 2007), 1.

¹²<http://www.iaiglobal.or.id.pdf>, PSAK 105 Akuntansi Mudharabah., di akses pada hari Selasa Tanggal 04-11-2014 pukul. 11:30



Pembiayaan Mudharabah pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu” .

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini termasuk dalam akuntansi lembaga keuangan syariah. Yang di dalamnya menyangkut tentang pembiayaan *mudharabah*.

2. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dan meluas masalah dalam penelitian, maka peneliti memfokuskan masalah hanya pada penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT telah sesuai dengan PSAK 105.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

- Bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu?
- Apakah penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera telah sesuai dengan PSAK 105?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui sistem pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu.
- Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu dengan PSAK 105.



D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.

3. Bagi pihak-pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak lain yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Indrawati (2012) yang meneliti mengenai “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT Surya Maspul Belajen”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan mudharabah masih belum sesuai standar. Definisi dan karakteristik yang belum sesuai standar adalah istilah mitra aktif dan mitra pasif serta tidak dilakukannya pencatatan akuntansi setelah pembiayaan untuk pembiayaan berskala kecil sehingga dalam pengakuan mitra selanjutnya hanya berdasar analisis kelayakan yang ditulis saat pengajuan pembiayaan. Pengakuan yang belum sesuai adalah pengakuan pendapatan pembiayaan berskala kecil yang tidak dapat dilihat pada catatan akuntansi setelah pembiayaan diberikan. Untuk pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 105. Jurnal untuk transaksi pembiayaan *mudharabah* diperbaiki kembali. Penyajian unsur-unsur neraca tidak



dicantumkan, masih pada letak pos-pos, dan nama pos-pos yang belum sesuai dengan dengan PSAK. Pengungkapan pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No. 105. Dari beberapa koreksi tersebut, kemudian diajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi lembaga dalam memperbaiki dan mengembangkan fungsi personalia dimasa yang akan datang.¹³

Penelitian yang dilakukan Silpia Navita Sari (2011) yang meneliti mengenai “Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No.105 (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia)”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pihak Bank tidak menghadapi kendala-kendala yang berarti karena Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi-transaksi sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan transaksi-transaksi yang dicatat oleh PT. Bank Muamalat Indonesia. Penerapan akuntansi baik pengakuan, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia ini secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 105 mengenai akuntansi *mudharabah*.¹⁴

Penelitian yang dilakukan Haryo Bimo Pramudito (2013) yang meneliti mengenai “Perlakuan atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Perlakuan akuntansi *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Wuluhan telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Irwanto (2014) yang meneliti mengenai “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu

¹³Indrawati,”Analisis Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada BMT Surya Maspul Belajen.”(*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makassar, 2012), 56.

¹⁴Silvia Navita Sari,”Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro Semarang, 2011), 47.

¹⁵Haryo Bimo Pramudito,” Perlakuan atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Syariah.”(*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2013), 34.



(UGT)". Berdasarkan hasil penelitian diketahui kontrak atau perjanjian pembiayaan mudharabah yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT UGD tidak biasa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak komersial. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih memberikan kebebasan pada nasabah untuk negosiasi terhadap opsi yang ditawarkan. Sehingga perjanjian-perjanjian tersebut tetap mengandung asas kebebasan berkontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan setelah melakukan tawar-menawar atau negosiasi.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Nuri Dwi Agustiani (2014) yang meneliti mengenai "Penentuan Jaminan pada Pembiayaan *Mudharabah* di kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Sumedang". Berdasarkan hasil penelitian diketahui 1) prosedur penentuan jaminan di KCP Bank Syariah Mandiri Sumedang adalah meliputi dua jenis sebagai berikut: a. yang memiliki legalitas. b. yang tidak memiliki legalita. 2) Bahwa penentuan jaminan di KCP Bank Syariah Mandiri Sumedang dengan fatwa DSN MUI adalah sesuai. Dimana kepercayaan dijadikan landasan utama dan bukan hal bukan yang pertama tetapi hal pokok demi menjaga kesehatan Bank.¹⁷

F. Kerangka Pemikiran

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Berdirinya BMT dilatarbelakangi karena adanya tuntutan masyarakat bagi adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dan tujuan dari didirikannya BMT adalah menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan

¹⁶Irwanto, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabahdi BMT UGT Bangkalan."(*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Utara Malaysia, 2014), 56.

¹⁷Nuri Dwi Agustiani,"Penentuan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah di kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Sumedang."(*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), 43.



dan jasa keuangan kepada masyarakat yang terhindar dari praktek-praktek usaha yang berbau riba.¹⁸

Di samping itu, BMT juga dapat dilihat sebagai salah satu instrument lembaga keuangan syariah, karena dari segi manajemen maupun operasionalnya BMT menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Dari segi konsep, BMT ditunjukan untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam bidang pengelolaan dana dan menyalurkan kredit usaha bagi masyarakat. BMT merupakan miniatur lembaga perbankan syariah seperti yang dikenal saat ini yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁹

Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islam tersebut, kini diimplementasikan dan dijadikan landasan operasioanl lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam tersebut, dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syariah berupa penggunaan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti: simpanan, pinjaman kredit dan pembiayaan dengan cara *mudharabah*, *musyarakah*, *giro wadhi'ah*, *murabahah*, *qardul hasan*, dan sebagainya.²⁰

Pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi , didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai kesepakatan bersama.²¹

Oleh karena itu, tidak ada alasan yang lebih rasional untuk meragukan akuntabilitas lembaga keuangan syariah, baik dari segi hukum dan etika maupun

¹⁸Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Keuangan Syariah*(Bandung:Pustaka Mulia & Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000), 107.

¹⁹Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*(Jakarta: Usaha Kami, 1996), 216.

²⁰Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*(Yogyakarta:UUI Press, 2000), 45-47.

²¹M Dawam Rahardjo, "Wacana Study Ekonomi Islam Kontemporer." *Ekonomi Islam* (Maret 2001): 5



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

segi pembagian keuntungan dan kerugiannya serta ketahanan institusi dari keadaan pailit. Karena prinsip bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (*rigid*), seperti dalam praktek bunga (*riba*) di lembaga keuangan konvensional yang selalu mengikuti standar umum fluktuasi nilai tukar mata uang.

BMT lahir bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulasi dana zakat, infaq dan sedekah. Kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis atau komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara, dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat diharapkan akan terus bertambah.

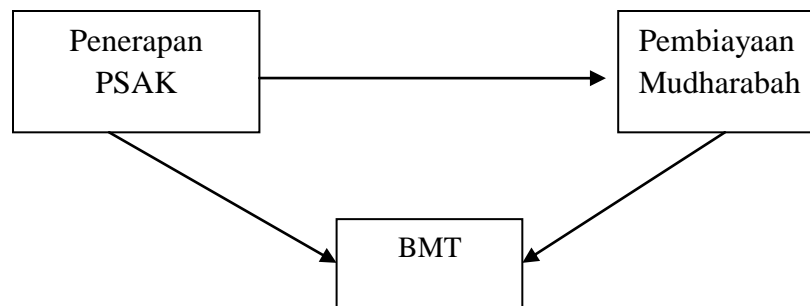
Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target. Penilaian tingkat kesehatan BMT sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan BMT yaitu SDM dan sumber daya termasuk di dalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.²²

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia diberi kebebasan dalam melakukan aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun semuanya harus sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Manusia sebagai pelaku ekonomi dan membutuhkan banyak modal dalam usahanya, maka janganlah berhubungan dengan Bank yang memakai

²²Muhammad Ridwan, *Pendiri Baitul Maal Wattamwil*(Yogyakarta: Citra Medika, 2006), 5.



perangkat bunga karena bunga Bank merupakan unsur riba dan dilarang oleh Allah.²³



Gambar 1.1
Kerangka Pemikir

G. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu yang beralamat di Grand Royal 1 Ruko Nomor 17 Indramayu (Depan Polres Indramayu).

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian penulis dilakukan mulai tanggal 11 Desember 2014 s/d 31 Maret 2015

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), kemudian disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, selain itu disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih

²³ Sholahudin M, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*(Malang: Muhammadiyah University Press, 2006), 16.



bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna dalam pengertiannya adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan kepada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut *transferability*. Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu di dalam penelitian deskriptif ini tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel.²⁴

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵

Pelaksanaan metode deskriptif tidak sebatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, akan tetapi meliputi juga analisa dan interpretasi tentang arti dan makna data itu sendiri. Oleh karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau interview dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.²⁶

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 234.

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.



3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait khususnya para karyawan BMT bagian akuntansi yang menangani bagian yang terkait dengan pembiayaan. Dalam hal ini sumber data yang diwawancarai adalah, manajer pembiayaan, pengelola pembiayaan.
- Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan seperti profil BMT serta data lainnya yang diterbitkan oleh BMT yang bersangkutan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

4. Menentukan Unit Analisis

Dalam menentukan unit analisis penerapan psak no.105 tentang pembiayaan mudharabah yaitu dengan menggunakan wawancara dengan karyawan BMT bagian pembiayaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui :

- Penelitian lapangan (*field research*) : metode pengumpulan data dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Dalam penelitian lapangan ini teknik yang akan digunakan yaitu :

- 1) Wawancara : suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak tertentu terkait pembiayaan mudharabah.
- 2) Pengamatan (observasi) yakni melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan.



3) Dokumentasi : suatu cara pengumpulan data dengan melihat, mengumpulkan dan mempelajari dokumen lapangan dan catatan maupun sumber tertulis lain yang terdapat di perusahaan.

b. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan pembiayaan mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II Landasan Teori yang dimulai dengan menjelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pada Bab III Metode Penelitian sebagai gambaran proses penelitian di lapangan di sesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang dimaksud meliputi: pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan diakhiri dengan teknis analisis data.

Pada Bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi: profil tempat penelitian, dan wawancara narasumbertentang bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu. Dan apakah penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Bina Umat Sejahtera telah sesuai dengan PSAK 105.

Pada Bab V Penutup yang terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sementara itu, sub saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Penerapan PSAK No. 105 tentang Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pembiayaan *Mudharabah*

Sistem pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun dengan skema pembiayaan yang menyeluruh. Prosedur-prosedur dalam sistem pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada BMT Bina Umat Sejahtera dapat diklasifikasikan atas empat prosedur yaitu prosedur aplikasi pembiayaan *mudharabah*, prosedur realisasi pembiayaan *mudharabah*, prosedur monitoring pembiayaan *mudharabah*, dan prosedur penutupan fasilitas pembiayaan *mudharabah*.

2. Perlakuan Akuntansi *Mudharabah*

Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu telah sesuai dengan PSAK 105, Kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pengakuan dan pengukuran, BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Indramayu mencatat pembiayaan *mudharabah* anggota sebagai bentuk investasi dan mencatatnya sesuai dengan kas yang diberikan kepada anggota. Pengungkapan, Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian *mudharabah* yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal, diantara pasal tersebut menjelaskan tentang nominal pembiayaan dan tujuan pembiayaan.



B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Dalam usaha peningkatan kualitas nasabah yang potensial dan dapat dipercaya dalam pemberian pembiayaan. Khususnya pembiayaan *mudharabah* ada baiknya bila bagian pemasaran lebih di spesifikasikan tugasnya agar tidak terjadi penumpukan tugas. Unit pemasaran diharapkan dapat melihat potensi yang ada pada masyarakat, sehingga penyaluran dana dapat lebih maksimal dilakukan. Dengan adanya penyaluran dana yang baik, tentunya BMT dapat memberikan bagi hasil yang besar.
2. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah maka sebaiknya jaminan yang harusnya diberikan nasabah pada saat pembiayaan *mudharabah* diminimalkan atau bahkan ditiadakan karena tentunya akan menyulitkan kalangan ekonomi lemah. Tingkat resiko yang tinggi dalam pembiayaan dapat dihindari, misalnya dengan pembinaan dan monitoring rutin secara langsung, tentunya akan dapat meningkatkan produktivitas



DAFTAR PUSTAKA

- AbdMadjid, Baihaqi. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT*. Jakarta: PINBUK, 2000.
- Abdul GhofurAnshori. *KapitaSelektaPerbankanSyariah*. Yogyakarta: UIIPress, 2008.
- Ahmad HasanRidwan. *Bmtdan Bank Islam InstrumenLembagaKeuanganSyariah*. Bandung: PustakaBaniQuaraisy, 2004.
- Ali Zainudin. *HukumPerbankanSyariah*. Jakarta: SinarGrafika, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *ManajemenPenelitian*. Jakarta: RinekaCipta, 2007.
- Ascarya. *AkaddanProduk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Andriani, *BaitulMaalWatTamwilKonsepdanMekanisme di Indonesia*. Kediri: STAIN JurnalEmpirisma, 2005.
- DewanSyariahNasional, MajelisUlama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan SyariahNasional*. Jakarta, 2000.
- Heykal, Muhammad danNurulHuda. *LembagaKeuangan Islam TinjauanTeoritis danPraktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hall, James A, *SistemInformasiAkuntansi*. Jakarta: SalembaEmpat, IbnuHisyam, al-Syirat an- Nabawiyah, 2001.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada media Grroup, 2013.
- IlmiMakhalul. *TeoridanPraktekMikroKeuanganSyariah*. Yogyakarta: UIIPress, 2002.
- Karim, AdiwarmanAzwar. *Bank Islam AnalisisFiqhndanKeuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Lexy J Moleong. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2006.
- Mardani, *FiqhEkonomiSyariahFiqhMuamalah*. Jakarta: Kencana, 20112
- Muhammad. *Lembaga-lembagaKeuanganUmatKontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Muhammad Ridwan. *PendiriBaitulMaalWatTamwil*. Yogyakarta: CitraMedika, 2005.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Perwataatmadja Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- PINBUK. *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Tepadu* Jakarta: PINBUK, t.th.
- Pujiastuti, Umi. *Pendirian dan Pengelolaan BMT di Lingkungan Pondok Pesantren*. Jakarta: Depag, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam. *Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer*. makalah dalam "Seminar Ekonomi Islam" Jakarta, 10 Maret 2001
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Waat Tamwil*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Rifqi, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI, 2008.
- Rivai Veithzal. *Islamic Business and Economic Ethis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012
- Ridwan Muhammad. *Pendirian Baitul Maat Wat Tamwil*. Bandung: CV Diponegoro, 2002.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: AlfaBeta, 2002.
- Rodoni, Ahmaddan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Sholahudin M. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Malang: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*. Yogyakarta: Ekonomi, 2005.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*. Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2000.